



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

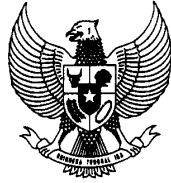
KEPUTUSAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2017

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;  
2. Peraturan Menteri Negara Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1210);

MEMUTUSKAN ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Legislasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dalam rangka pengawasan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2017

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
YOHANA YEMBISE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2017

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2017

No	Judul (Rancangan)	Latar Belakang	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
<b>DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER</b>						
1.	Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah	Sebagai pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara teknis mengatur tahapan pelaksanaan pelatihan baik oleh KPPPA dan Pemerintah Daerah	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Kemendagri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri.
2.	Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Anggota Legislatif	Sebagai pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara teknis mengatur tahapan pelaksanaan pelatihan baik oleh KPPPA dan Pemerintah Daerah	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Kemendagri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	2017	Masih dalam tahap penyusunan panduan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3.	Nota Kesepahaman antara KPPPA dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG di Lingkungan LAN	Perpanjangan Nota Kesepahaman yang telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2015	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	LAN	2017	Sudah dalam tahap penyusunan draft Rancangan Nota Kesepahaman
4.	Kesepakatan Bersama Antara KPPPA dengan 6 (enam) Pemerintah Daerah tentang Pengembangan Industri Rumahan	Untuk mempercepat pembangunan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan perempuan usaha mikro dan kecil.	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi	6 (enam) Pemerintah Daerah	2017	Sudah dalam proses penandatanganan dengan pihak Pemerintah Daerah
5.	Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan PUG	Belum ada kesepakatan sebelumnya	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Kemen ESDM	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Kesepakatan Bersama



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6.	Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebelumnya yang telah berakhir pada tanggal 19 Januari 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan.	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Kemenhub	2017	Sudah dalam tahap koordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan.
7.	Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo)	Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebelumnya yang telah berakhir pada tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Kemen Kominfo	2017	Sudah dalam tahap koordinasi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika.
8.	Kesepakatan Bersama Antara KPPPA dengan 6 (enam) Perguruan Tinggi Agama Islam tentang Percepatan Pelaksanaan	Untuk mempercepat pemahaman dan implementasi PUG di Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, IAIN Ternate Maluku Utara, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UIN	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga	Perguruan Tinggi Agama Islam	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Kesepakatan Bersama



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Penguatan Akademik	Mataram NTB, STAIN Ponorogo Jawa Timur, IAI Sultan Muhammadiyah Syaifuddin Sambas Kalimantan Barat)				
--	---	---	--	--	--	--

**DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

9.	Peraturan Menteri PPPA tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	UPT PPA yang telah ada atau yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah perlu dikelola dengan baik untuk menjamin kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, akuntabilitas, dan keterbukaan.	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Kemensos, Kemenag, Kemenkes, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	2017	Sudah ditandatangani tanggal 4 Januari 2017 dan mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 23 Januari 2017.
----	--	---	--	--	------	--



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

10.	Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Pelatihan bagi SDM P2TP2A tentang Pencegahan dan Penanganan KDRT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menurunkan angka KDRT dan mengingatkan penanganan kepada korban</li><li>• Menerapkan layanan psikososial bagi para pendamping</li></ul>	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Komnas Perempuan, Kemensos, Kemenkes, Kemenag, Kejagung, MA, Advokat, LPSK, Polri, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kemenko PMK, P2TP2A DKI Jakarta, Dinas PP dan KB DKI Jakarta	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri.
11.	Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum tentang Penanganan Korban KDRT	Agar para APH peduli terhadap isu KDRT dan lebih responsif kepada korban KDRT.	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Komnas Perempuan, Kemensos, Kemenkes, Kemenag, Kejagung, MA, Advokat, LPSK, Polri, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kemenko PMK, P2TP2A DKI Jakarta, Dinas PP dan KB DKI Jakarta	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

12.	Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO	Karena keanggotaannya harus disesuaikan dengan perubahan nomenklatur di setiap Kementerian/Lembaga.	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	21 K/L	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Perubahan Peraturan Ketua Harian GTPPP TPPO.
13.	Kesepakatan Bersama tentang Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif	Amanat Pasal 164-166 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	Kemenkes, Kemendagri, dan Kemenaker.	2017	Sudah ditandatangani tanggal 18 Januari 2017 dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan sedang mempersiapkan penyusunan perjanjian kerja sama sebagai pelaksanaannya.
14.	Kesepakatan Bersama antara Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA dengan Pengurus Pusat	Perlunya penanganan tatalaksana terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan dokter forensik.	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	IDI	2017	Sudah ditandatangani pada bulan Februari 2017.





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

	Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia tentang Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2016					
15.	Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Aparat Penegak Hukum tentang Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Perpanjangan Kesepakatan Bersama yang telah berakhir tanggal 23 November 2015 tentang Akses Keadilan bagi perempuan Korban Kekerasan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	2017	Sudah dalam tahap koordinasi dengan para pihak terkait.
16.	Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Persatuan Advokat Indonesia tentang Penanganan Kasus Perempuan Disabilitas	Tingginya kasus kekerasan perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Persatuan Advokat Indonesia	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Kesepakatan Bersama.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

17.	Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kemenaker tentang Sinergitas Program Desa Migran Produktif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga TKI</li><li>• Untuk memperluas kesempatan kerja bagi pekerja migran perempuan</li></ul>	Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan	Kemenaker	2017	Sudah dalam tahap pembahasan draft Rancangan Kesepakatan Bersama
-----	--	--	--	-----------	------	--

**DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK**

18.	Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak	Amanat Pasal 71C ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, KPI, BKKBN, BNN, BAPENAS, Pusat Kajian Perlindungan Anak UI, Yayasan Kita dan Buah Hati, P2TP2A DKI Jakarta, Kemenaker, BNP2TKI, Kemenko PMK, Polri, Kemenpar, Kemenkominfo, Kemendagri, LPSK,	Polri, Kejaksaan Agung, MA, Kementerian Setneg, Kemenkes, Kemensos, Kemenkumham	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Pemerintah.
-----	--	--	--	---	------	--



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

			Yayasan Perlindungan Anak Cacat			
19.	Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana	Amanat Pasal 71D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemenkumham, LPSK, Setneg, Kemenkes, Kemensos	2017	Sedang menunggu tahap pengesahan oleh Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.
20.	Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	Amanat Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.	Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Polri, Kejaksaan Agung, MA, Kementerian Setneg, Kemenkes, Kemensos, Kemenkumham, Kemenko PMK, Kemekominfo, Kemenag, Akademisi, Kemendikbud, LPSK, Kementerian PPN/Bappenas, Setkab, Kemenlu, KPAI	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Pemerintah



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

21.	Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak	Amanat Pasal 73A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	Polri, Kejaksaan Agung, MA, KPAI, Komnas PA, Kemensos, Kemenkes	2017	Sudah dalam tahap pembahasan dengan Kementerian/Lembaga.
22.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tindak pidana anak	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak	Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi	Polri, Kejaksaan Agung, MA, KPAI, Komnas PA, Kemensos, Kemenkes, Kemenkumham	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri.
23.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas	Sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus	Kemensos, Kemenkes, KPAI, YPAC	2017	Sudah dalam proses pembahasan dengan Kementerian/Lembaga terkait.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

24.	Kesepakatan Kerjasama antara KPPPA dengan <i>The Asia Foundation</i> Indonesia tentang Pelaksanaan Revolusi Mental Dalam Perlindungan Anak	Tindak lanjut dari kesepakatan hibah antara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dengan <i>The Asia Foundation</i> untuk <i>Support to Strengthen the Capacity of Civil Society Organizations to Empower Marginalized Groups to Improve their Socio-Economic Conditions</i> – untuk Program Peduli Indonesia di bawah koordinasi Kemenko PMK pada tanggal 17 April 2014.	Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi	KPPPA, Asia Foundation	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Kesepakatan Kerjasama.
-----	--	--	--	------------------------	------	---

**DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK**

25.	Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>Amanat Pasal 21 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</li><li>Mewujudkan negara Indonesia menjadi Indonesia</li></ul>	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Bappenas, Kemenkeu, Kemensos, Kemenko PMK, KemenPANRB, Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Kemenag, Kemenkes,	2017	Sedang dalam tahap pembahasan Lampiran Peraturan Presiden dengan Kementerian/Lembaga dan sudah dibuat SK PAK: yaitu SK Menteri PPPA Nomor 72 Tahun 2016 tentang Panitia AntarKementerian/NonKementerian Penyusunan Rancangan
-----	--	--	-----------------------------------	---	------	--



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

		Layak Anak (Idola) di Tahun 2030. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaturan tentang Kabupaten/Kota Layak Anak dilakukan secara terintegrasi antara pusat dan daerah, yang mencakup arah, sasaran, penyelenggaraan, pembinaan, dan pendanaan kebijakan.</li></ul>		Kemendikbud, Kemen Kominfo, KDPDTT, Kemenaker, Kemen PUPera, Kemen Setneg, Kemendagri, Kemenhub, Kemenpar, KPAI, KPI, BKKPN, BNN, BPOM, BNPB, BPS, Perpustakaan Nasional		Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Layak Anak.
26.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standarisasi Ruang Bermain Ramah Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum memiliki standar ruang bermain ramah anak.</li><li>• Pertimbangan terkait sertifikasi.</li></ul>	Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan	Kemen PUPera, Kemendagri, Bappenas, Kemenkumham	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri.

**DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT**

27.	Peraturan Menteri PPPA tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Setiap orang termasuk masyarakat berhak berpartisipasi dan membantu pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Organisasi kemasyarakatan	2017	Sudah ditandatangani tanggal 13 Februari 2017 dan berlaku sejak diundangkan tanggal 22 Februari 2017.
-----	--	--	---	---------------------------	------	---



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

28.	Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang Pelindungan Perempuan dan Anak di Bidang Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mewujudkan penyiaran yang terbebas dari segala bentuk muatan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pelabelan terhadap perempuan dan anak;</li><li>• Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengupayakan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pelabelan terhadap perempuan dan anak di bidang penyiaran.</li></ul>	Asdep Partisipasi Media	KPI	2017	Sudah ditandatangani tanggal 1 Februari dan berlaku selama 4 (empat) tahun.
29.	Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan PUG, PP, dan PA antara KPPPA dengan Lembaga Sensor Film (LSF).	LSF sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melakukan sensor di bidang media, diharapkan dapat bersinergi dalam pembangunan PP dan PA di bidang media khususnya di bidang literasi masyarakat	Asdep Partisipasi Media	LSF	2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih dalam tahap koordinasi dengan pihak LSF.</li><li>• Diusulkan agar bentuknya diubah menjadi Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Deputi.</li></ul>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

30.	Kesepakatan Bersama dalam Pelaksanaan PUG, PP, dan PA antara KPPPA dengan Aliansi Jurnalis Independent (AJI).	AJI sebagai lembaga nonpemerintah yang mewadahi para jurnalis-jurnalis media, diharapkan dapat bersinergi dalam pembangunan PP dan PA di bidang media khususnya dalam membangun kapasitas SDM media	Asdep Partisipasi Media	AJI	2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Masih dalam tahap koordinasi dengan pihak AJI.</li><li>Diusulkan agar bentuknya diubah menjadi Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Deputi.</li></ul>
-----	---	---	-------------------------	-----	------	--

**INSPEKTORAT**

31.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan KPPPA	Untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN maka seluruh ASN di lingkungan KPPPA wajib melaporkan harta kekayaannya	Inspektorat	Internal KPPPA	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri
32.	Perjanjian Kerjasama antara Inspektorat Kemenko PMK, KPPPA, Kemenpora, ANRI, Bapeten, Lemsaneg, dan Komnas HAM tentang Tim Gabungan Penilai Angka Kredit	Sebelumnya pada tahun 2016 sudah ada Perjanjian Kerjasama yang melibatkan 6 instansi, namun pada tahun 2017 ada penambahan anggota baru dalam Tim Gabungan Penilai Angka Kredit Auditor yaitu Komnas HAM.	Inspektorat	Kemenko PMK, Kemenpora, ANRI, Bapeten, Lemsaneg, dan Komnas HAM	2017	Sedang dalam tahap pembahasan antar Kementerian/Lembaga.





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

	Auditor					
33.	Peraturan Menteri PPPA tentang Kebijakan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Inspektorat memiliki fungsi penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KPPPA sebagaimana termaktub dalam Pasal 375 huruf a Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Inspektorat	Internal KPPPA	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri

**BIRO HUKUM DAN HUMAS**

34.	Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komnas Perempuan	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Biro Hukum dan Humas	Kemsetneg, KemekoPMK, KemenpanRB, Kemenkeu, Komnas Perempuan, Kemenkumham	2017	Masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian PANRB.
35.	Peraturan Menteri PPPA tentang	Menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 87	Biro Hukum dan Humas	Internal KPPPA	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

	Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan KPPPA	Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan				Menteri.
--	--	---	--	--	--	----------

**BIRO UMUM DAN SDM**

36.	Peraturan Menteri PPPA tentang NSPK	Sinkronisasi dengan RPP tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Konkuren	Bagian Ortala, Biro Umum dan SDM	Internal KPPPA	2017	Sedang dalam tahap penyusunan draft Lampiran Peraturan Menteri.
37.	Peraturan Menteri PPPA tentang Analisis Jabatan	Sebagai dasar untuk menghitung beban kerja.	Bagian Ortala, Biro Umum dan SDM	Internal KPPPA	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri.
38.	Peraturan Menteri PPPA tentang Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan KPPPA	Sebagai dasar untuk mengisi jabatan pelaksana di KPPPA.	Bagian Ortala, Biro Umum dan SDM	Internal KPPPA	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Lampiran Peraturan Menteri.
39.	Peraturan Menteri PPPA tentang Road Map RB	Untuk mengetahui peta pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam kurun waktu tertentu	Bagian Ortala, Biro Umum dan SDM	Internal KPPPA	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Lampiran Peraturan Menteri.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

40.	Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Kompetensi Manajerial	Kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam fungsi manajerial.	Bagian Pengembangan SDM, Biro Umum dan SDM	Internal KPPPA	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri.
41.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja	Karena cuti masih dibayarkan penuh	Bagian Pengembangan SDM, Biro Umum dan SDM	Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Perubahan Peraturan Menteri.
42.	Peraturan Menteri PPPA tentang <i>Grand Design</i> Pengembangan SDM Tahun 2014-2019	Untuk menghasilkan ASN yang bermutu dan professional diperlukan rancangan besar secara menyeluruh terkait SDM dalam waktu tertentu.	Bagian Pengembangan SDM, Biro Umum dan SDM	Kemen PANRB, BKN, Kemen Setneg	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri.
43.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pola Karir PNS KPPPA	Menyesuaikan dengan OTK yang baru.	Bagian Pengembangan SDM, Biro Umum dan SDM	Kemen PANRB, BKN, Kemen Setneg	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Perubahan Peraturan Menteri.
44.	Peraturan Menteri PPPA tentang NSPK Pembentukan Unit Pelaksana Teknis	Amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Bagian Ortala, Biro Umum dan SDM	Internal KPPPA	2017	Masih dalam tahap penyusunan konsepsi Peraturan Menteri



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak						
--	--	--	--	--	--	--

<b>BIRO PERENCANAAN DAN DATA</b>						
45.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Renstra KPPPA Tahun 2015-2019	Perubahan struktur KPPPA Tahun 2016	Bagian PPA, Biro Perencanaan dan Data	Internal KPPPA	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri.
46.	Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup KPPPA	Disesuaikan dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada K/L	Bagian PPA, Biro Perencanaan dan Data	Internal KPPPA, Kemenkeu, Kemenkumham	2017	Sedang dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

47.	Peraturan Menteri PPPA tentang Tata Kelola Sistem Informasi Gender dan Anak	Belum ada pengaturan terkait Tata Kelola Sistem Informasi Gender dan Anak	Bagian Data, Biro Perencanaan dan Data	Kemenkominfo, BPS, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Peraturan Menteri.
48.	Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Induk Teknologi Informasi KPPPA	Belum ada standarisasi kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan teknologi informasi di KPPPA sehingga perlu diatur dalam Peraturan Menteri	Bagian Data, Biro Perencanaan dan Data	Kemenkominfo, BPS, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri.
49.	Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Perempuan dan Anak Secara Nasional	bahwa KPPPA belum memiliki data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terintegrasi secara nasional.	Bagian Data, Biro Perencanaan dan Data	Kemenkominfo, BPS, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Peraturan Menteri.
50.	Kesepakatan Bersama Trilateral dengan Kemensetneg dan USAID tentang Kerjasama Teknik Luar Negeri	Mendapatkan dukungan anggaran dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral antara KPPPA dengan Negara lain	Bagian Kerjasama, Biro Perencanaan dan Data	Kementerian Setneg, USAID	2017	Masih dalam tahap koordinasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

51.	Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan dan Sinergitas Data Kependudukan	Belum ada pengaturan terkait pemanfaatan data kependudukan	Bagian Data, Biro Perencanaan dan Data	Kemendagri	2017	Masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Perjanjian Kerjasama.
52.	Perpanjangan Kesepakatan Bersama dengan <i>Colombo Plan</i> .	KPPPA sebagai <i>focal point gender affair program Colombo Plan</i>	Bagian Kerjasama, Biro Perencanaan dan Data	Kementerian Setneg, <i>Colombo Plan</i>	2017	Masih dalam tahap koordinasi.

**KPAI**

53.	Nota Kesepahaman antara KPAI dengan BNPT tentang Kerjasama Pengawasan dan Perlindungan Anak dalam Rangka Penanggulangan Terorisme	Perlunya kerja sama dan sinergitas dalam melaksanakan kebijakan pengawasan dan perlindungan anak dalam penanggulangan terorisme.	KPAI	BNPT	2017	Sudah ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2017 dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
54.	Nota Kesepahaman antara KPAI dengan 17 (tujuh belas) institusi tentang Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perlunya kerja sama dalam rangka pengawasan perlindungan anak dengan 17 institusi yaitu: MUI,</li></ul>	KPAI	MUI	2017	Sudah ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2017 dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Anak	UHAMKA, PGRI, Himpaudi, Penggiat Keluarga Indonesia (GIGA), UI, PP Muhammadiyah, BK3S, FEMA IPB, KWI, PT. Kasandra Persona Pra Wacana, LPAI, Persaudaraan Pena, LBH Catur, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), PB NU, Pusat Studi Keluarga dan Pendidikan Ramah Anak (Puskapera) <ul style="list-style-type: none"><li>• Efektivitas pengawasan dan perlindungan anak dengan pelibatan unsur-unsur masyarakat.</li></ul>				
------	---	--	--	--	--

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
YOHANA YEMBISE